



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)

KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA BUKITINGGI
TAHUN ANGGARAN 2017





KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan mengucapkan Puji dan Syukur Alhamdulillah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi Tahun 2017 dapat tersusun sesuai jadwal.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2017 ini merupakan wujud penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sebagai implementasi dari prinsip-prinsip pemerintahan yang baik yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi dan profesionalisme serta bentuk kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggung-jawabkan keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan oleh Kepala Daerah kepada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi sebagai pelaksana kewenangan Pemerintahan Daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

Diharapkan Laporan Kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik ini dapat memberikan informasi kinerja yang terukur kepada Kepala Daerah atas kinerja yang telah dicapai dan bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan, baik sebagai evaluasi maupun parameter dalam meningkatkan kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi.

Sebagai bentuk rasa syukur atas pencapaian kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi Tahun 2017, kami senantiasa akan selalu berkomitmen untuk meningkatkan kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi ke depannya.

Kami berharap LKIP ini dapat memenuhi harapan seluruh stakeholders kota dan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pemerintahan di Kota Bukittinggi

Terakhir kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam menyusun LKIP ini. Semoga Allah SWT selalu meridhoi segala upaya kita dalam mengabdikan bagi kepentingan masyarakat, bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tercinta ini.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Bukittinggi, Februari 2018

KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA BUKITTINGGI





RINGKASAN EKSEKUTIF

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2017 dalam pelaksanaan tugasnya menetapkan 3 (tiga) sasaran strategis yang ingin dicapai melalui pengukuran beberapa indikator kinerja. Secara umum pencapaian kinerja sasaran strategis dapat tercapai dengan baik, walaupun ada beberapa indikator yang tidak terealisasi.

Sasaran strategis Meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang wawasan kebangsaan, ideologi dan pembauran kebangsaan serta terwujudnya ketahanan ekonomi, seni dan budaya yang memiliki 1 (satu) indikator kinerja, mencapai target 100%.

Sasaran strategis Meningkatkan Keamanan, Ketentraman, dan Ketertiban Masyarakat di nilai melalui 2 (dua) indikator kinerja. Dari dua indikator tersebut terdapat satu indikator yang tidak tercapai yakni dengan tingkat capaian 75%. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya potensi ancaman, gangguan, tantangan, dan hambatan dalam menciptakan kondusivitas daerah, serta tingginya intensitas gangguan kamtibmas seperti kebakaran-kebakaran di pasar atas dan pasar aur, pembongkaran area PJKA.

Sasaran Meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang kehidupan berpolitik demi terwujudnya stabilitas kehidupan berdemokrasi. Capaian kinerja sasaran ini diukur melalui pencapaian kinerja 2 (dua) indikator ini dapat dicapai dengan baik 100%



DAFTAR ISI

	halaman
KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii-iv
DAFTAR TABEL	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Landasan Hukum	2
C. Maksud dan Tujuan	4
D. Sistematika Penulisan	4
E. Tugas dan Wewenang Kantor Kesatuan bangsa dan Politik Kota Bukittinggi	6
F. Susunan Organisasi	9
G. Pegawai	10
BAB II PERENCANAAN KINERJA	12
A. Tujuan dan Sasaran	12
B. Kebijakan dan Program	13
C. Rencana Kinerja Tahunan	14
D. Penetapan Kinerja	22
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	23
A. Capaian Kinerja Organisasi	23
B. Evaluasi dan Analisis Realisasi Kinerja	24
C. Kendala Yang Dihadapi	25
D. Strategi Peningkatan Kinerja	26
E. Realisasi Anggaran	27
BAB IV PENUTUP	34
A. Kesimpulan	34
B. Langkah Kedepan	34



DAFTAR TABEL

	halaman
Tabel 1.1 Struktur Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi	10
Tabel 1.2. Pegawai Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi Berdasarkan Golongan.....	10
Tabel 1.3. Pegawai Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi Berdasarkan Pendidikan	10
Tabel 2.1. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2017.....	16
Tabel 3.1. Pengukuran Realisasi Kinerja Tahun 2017.....	24
Tabel 3.2. Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran	24
Tabel 3.3. Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode RPJMD ...	25
Tabel 3.4. Persentase Alokasi Anggaran	29
Tabel 3.5. Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran	29
Tabel 3.6. Realisasi Anggaran Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2017	29



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka mendorong terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu persyaratan terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya, serta didukung oleh semangat reformasi untuk mewujudkan sebuah sistem pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN), pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan seluruh instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan dalam rangka mencapai visi dan misi organisasi. Dalam pelaksanaannya, Peraturan Presiden ini dilengkapi dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sebagai pelaksanaan terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tersebut Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi telah melaluinya dengan penyusunan perencanaan dan penganggaran serta perencanaan dan pengukuran kinerja yang terintegrasi dan menyeluruh. Pelaksanaannya dimulai dengan penyusunan Rencana Strategis Tahun 2016 – 2021 dilanjutkan dengan Rencana Kerja Tahunan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi. Penyusunan perencanaan tersebut dilengkapi dengan indikator kinerja dari pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi, yang selanjutnya dioperasionalkan ke dalam sistem penganggaran yang tertuang dalam APBD Kota Bukittinggi. Mepedomani APBD Kota Bukittinggi yang telah ditetapkan, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi menyusun dan menetapkan perjanjian kinerja yang akan dicapai pada tahun anggaran bersangkutan.



Sebagai wujud pertanggungjawaban terhadap perencanaan dan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan dalam upaya pencapaian tujuan organisasi, disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi Tahun 2016 sesuai amanat Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

B. Landasan Hukum

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi Tahun 2016 disusun dengan berlandaskan kepada:

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;



13. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
16. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 05 Tahun 2006 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 08 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bukittinggi Tahun 2006-2025;
18. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Bukittinggi;
20. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Bukittinggi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2013;
21. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021;
22. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 13 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2016;



23. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 29 Tahun 2013 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Eselon III Serta Rincian Tugas Eselon IV Pada Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bukittinggi;
24. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 69 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2017

C. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi Tahun 2017 adalah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan dalam rangka mencapai visi dan misi organisasi

Sedangkan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi Tahun 2017 ini adalah:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada Kepala daerah atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi untuk meningkatkan kinerjanya.

D. Sistematikan Penulisan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2017 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

IKHTISAR EKSEKUTIF

Bagian ini menguraikan secara singkat tentang tujuan dan sasaran yang akan dicapai beserta hasil capaian, kendala-kendala yang dihadapi dalam mencapai tujuan dan sasaran, langkah-langkah yang diambil, serta langkah antisipatifnya.



BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, Sistematikan Penulisan, Tugas dan Wewenang Organisasi, Susunan Organisasi, Pegawai serta penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi, permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II RENCANA STRATEGIK

Pada bab ini diuraikan Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran, Kebijakan dan Program, Rencana Kerja Tahunan dan Penetapan Kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi Tahun 2017

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya



B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN

Berisi substansi-substansi yang mendukung penjelasan atau narasi laporan ini.

E. Tugas dan Wewenang Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Bukittinggi.

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi merupakan unsur pelaksana tugas Walikota di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, dengan tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi dalam melaksanakan tugas pokoknya menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
2. Pemberian dukungan atas Kesatuan Bangsa dan Politik;
3. Pemberian dukungan atas Kewaspadaan Dini;
4. Peningkatan Bimbingan Umum dan Bimbingan Masyarakat;
5. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;



6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi didukung dengan Sumber Daya Manusia sebanyak 20 orang, dengan rincian Kepala Kantor (eselon IIIa) 1 orang, Kasubag Tata Usaha (eselon IVa) 1 orang, Kepala Seksi (eselon IVa) 3 orang dan fungsional umum sebanyak 15 orang.

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi mengemban tugas yang sangat berat dalam melaksanakan tugas pokok dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Hal ini dikarenakan Kota Bukittinggi yang hanya mempunyai luas 25,239 Km² atau sekitar 0,06 % dari luas Provinsi Sumatera Barat ini dihuni oleh penduduk dengan jumlah 120.491 jiwa (Statistik Daerah Bukittinggi 2016) yang terdiri dari berbagai macam Suku Bangsa dan Agama. Sesuai dengan tugas Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi dalam pembinaan Kesatuan Bangsa serta Kewaspadaan Dini, hal ini menjadi perhatian dalam upaya pencegahan konflik di tengah-tengah masyarakat dan menciptakan kerukunan antar umat beragama.

Selain faktor penduduk yang heterogen tersebut, pembangunan Kota Bukittinggi yang bertumpu pada bidang pendidikan, pelayanan kesehatan, perdagangan dan jasa serta pariwisata yang didukung dengan kondisi iklim dan alam yang sangat nyaman menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat daerah lain, baik untuk beraktifitas maupun hanya berkunjung. Berdasarkan hal itu, Kota Bukittinggi merupakan kota kecil yang sangat padat aktifitas setiap harinya, dimana dengan melihat data statistik jumlah penduduk siang hari di Kota Bukittinggi bisa mencapai 2 sampai 3 kali lipat dari penduduk asli Kota Bukittinggi. Dengan kondisi dan dinamika tersebut, Kota Bukittinggi sangat rawan dengan adanya potensi, gejala, atau peristiwa yang menjadi ancaman stabilitas di daerah. Hal ini menjadi tantangan bagi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi dalam mengantisipasi terjadinya konflik kepentingan terkait dengan seluruh aspek kehidupan masyarakat.



Dilihat dari aspek Kota Bukittinggi sebagai kota pendidikan yang telah banyak melahirkan intelektual, tidak hanya melayani masyarakat Bukittinggi saja, akan tetapi juga banyak masyarakat sekitar Bukittinggi dan daerah lainnya tertarik untuk bersekolah di Bukittinggi. Hal ini menjadikan tugas bagi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya konflik di tengah-tengah masyarakat. Selain itu, peningkatan pemahaman terhadap wawasan kebangsaan juga menjadi perhatian bagi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik untuk terus ditanamkan pada seluruh peserta didik di Kota Bukittinggi.

Kota Bukittinggi sebagai Kota Pariwisata yang ditunjang dengan berbagai macam objek wisata serta alam dan iklim yang sangat nyaman menjadi magnet bagi pengunjung untuk datang ke Kota Bukittinggi. Selain untuk berwisata, Kota Bukittinggi juga sering dijadikan tempat untuk melakukan pertemuan baik skala nasional maupun internasional, karena hal ini didukung juga dengan kondisi Kota Bukittinggi yang aman. Dengan tingginya lalu lintas kunjungan ke Kota Bukittinggi juga menjadi tugas berat bagi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik untuk selalu memantau kegiatan yang dilaksanakan di Kota Bukittinggi guna menjaga stabilitas daerah dan nasional, khususnya pemantauan terhadap kegiatan Orang Asing maupun Organisasi Non Pemerintah.

Selain aspek pendidikan dan pariwisata, Kota Bukittinggi juga dikenal sebagai Kota Perdagangan dan Jasa. Kota yang mempunyai tiga pasar utama ini menjadi pusat kegiatan ekonomi di Kota Bukittinggi. Guna menjaga ketahanan dan stabilitas ekonomi, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik bersama instansi terkait melaksanakan peranan dalam pemantauan dan menjaga kondisi perekonomian selalu stabil dan terhindar dari pelaku pasar yang curang seperti peredaran barang ilegal dan juga adanya penimbunan produk ekonomi dan lain sebagainya.

Selain terkait dengan kesatuan bangsa, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi juga mempunyai tugas di bidang Politik Dalam Negeri. Hal ini terkait dengan peningkatan pendidikan politik masyarakat, dimana dengan tingkat kesibukan aktifitas masyarakat di Kota Bukittinggi, Kantor



Kesatuan Bangsa dan Politik selalu berupaya dalam pemberian pembinaan terkait dengan pendidikan politik di tengah-tengah masyarakat, sehingga masyarakat tidak mengabaikan hak politik yang mereka miliki.

Dalam menjalankan tugasnya, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi selalu berkoordinasi dengan seluruh stakeholder terkait. Dimulai dari SKPD Kota Bukittinggi, unsur pemerintahan secara berjenjang mulai dari kelurahan sampai tingkat RT dan RW, DPRD, instansi vertikal khususnya Polresta Bukittinggi, Kodim 0304 Agam, Kejaksaan Negeri Bukittinggi, Imigrasi Bukittinggi, Kementerian Agama dan juga organisasi kemasyarakatan lainnya.

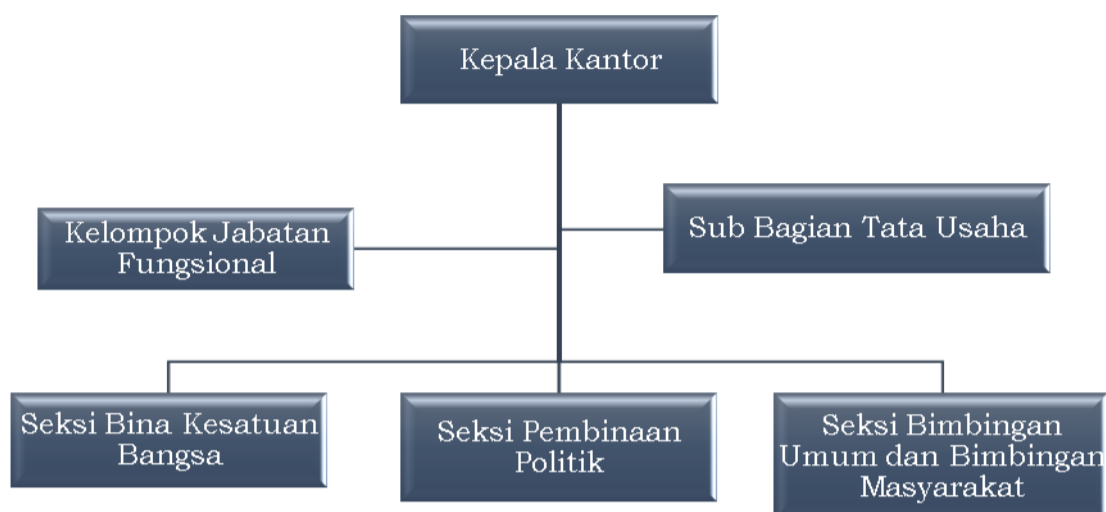
Dalam pelaksanaan tugas Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi tentunya perlu dukungan seluruh pihak serta peningkatan kompetensi Sumber Daya Aparatur dan fasilitas pendukung lainnya.

F. Susunan Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Bukittinggi, susunan organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi, sebagai berikut:



Tabel 1.1.
Struktur Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi



G. Pegawai

Dalam pelaksanaan tugas Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 20 (dua puluh) orang. Rincian sumber daya manusia pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi digambarkan pada tabel berikut.

Tabel 1.2.
Pegawai Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi Berdasarkan Golongan

No	Golongan	Jumlah (orang)
1	Golongan IV	2
2	Golongan III	16
3	Golongan II	2
	Jumlah	20

Tabel 1.3.
Pegawai Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi Berdasarkan Pendidikan

No	Golongan	Jumlah (orang)
1	Strata 2	4
2	Strata 1 / D4	12
4	SLTA / Sederajat	4
	Jumlah	20



Dari data diatas, dapat terlihat bahwa secara kuantitas personil Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik masih sangat kekurangan atau sangat minim. Secara kualitas, meskipun dipengaruhi oleh jumlah yang kurang namun dikarenakan penerapan budaya *learning by doing* dan saling berbagi informasi dengan membangun komunikasi dan transfer pengetahuan, penyelenggaraan tugas pokok dan tugas kedinasan lainnya dapat berjalan baik.



BAB II PERENCANAAN KINERJA

Rencana Strategis merupakan perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin di raih selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun secara sistimatis dan berkesinambungan dengan memperhatikan potensi, peluang dan kendala yang mungkin terjadi serta upaya-upaya yang akan dilakukan untuk mengatasinya. Rencana Strategis memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan serta ukuran keberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran.

A. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Walikota Bukittinggi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Sedangkan sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran harus lebih spesifik, terukur dan memiliki indikator yang rinci. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi.

Tujuan dan sasaran Kantor Kesbangpol Kota Bukittinggi, adalah sebagai berikut :

1. Tujuan

Berdasarkan visi dan misi Walikota Bukittinggi maka tujuan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi adalah ***“Meningkatnya Kenyamanan Kota Bukittinggi”***



2. Sasaran

Adapun sasaran yang akan dicapai oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Satbilitas Politik
2. Meningkatnya Keamanan Kota Bukittinggi

B. KEBIJAKAN DAN PROGRAM

1. Kebijakan

Kebijakan yang ditempuh oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan ketentuan-ketentuan yang bersifat strategis yang diambil dan ditetapkan untuk dijadikan pedoman dan petunjuk bagi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada subag dan seksi. Kebijakan yang telah ditetapkan ini dimaksudkan untuk lebih mendorong dan memfokuskan pada usaha pencapaian tujuan dan sasaran yang sesuai dengan misi dan visi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik. Kebijakan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik meliputi:

- a. Melaksanakan penempatan, mutasi dan pengembangan karir aparatur yang sesuai dengan disiplin ilmu yang dimiliki.
- b. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan aparatur berbasis teknologi.
- c. Melaksanakan pemberian reward dan punishment bagi aparatur berbasis indikator kinerja.
- d. Melaksanakan penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual.
- e. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap perkembangan sistem budaya politik dan demokratis.
- f. Menyelenggarakan fasilitas dan pembekalan politik bagi masyarakat.
- g. Melakukan pembinaan, pengawasan dan pendataan terhadap Ormas/ LSM.
- h. Memaksimalkan kinerja tim pengawas aliran kepercayaan yang telah dibentuk.



- i. Menyelenggarakan dan memaksimalkan tugas dan fungsi forum kerukunan umat beragama.
- j. Melakukan koordinasi dan mengadakan forum pementapan wawasan kebangsaan.
- k. Membentuk forum pembauran kebangsaan.
- l. Melakukan pendidikan bela Negara terhadap generasi muda.
- m. Melakukan pendidikan bela Negara terhadap generasi muda.
- n. Melakukan rapat tim, koordinasi serta memberikan laporan pemantauan terhadap konflik yang mengarah pada gangguan dan acaman terhadap ketentraman masyarakat.
- o. Melakukan razia, pembekalan terhadap semua lapisan masyarakat terkait pencegahan, penanggulangan dan peredaran gelap narkoba.
- p. Membentuk tim pengawasan orang asing dan melakukan rapat-rapat pembahasan keberadaan orang asing.

2. Program

Program merupakan penjabaran dari kebijakan yang telah dirumuskan, program merupakan kumpulan kegiatan nyata yang disusun secara sistimatis dan terpadu yang dilaksanakan oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik yang merupakan dukungan bagi keberhasilan dalam pelaksanaan untuk mencapai tujuan.

Program Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik yang ada pada DPA SKPD adalah :

- a. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- b. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
- c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
- d. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- e. Program Pelaksanaan Penghormatan Hari-Hari Besar
- f. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
- g. Program Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Agama dan Pembinaan Kerukunan Beragama



- h. Program Pencegahan Penanganan dan Rehabilitasi Narkoba
- i. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
- j. Program Pendukung Kelancaran Penyelenggaraan Pemilu/ Pilkada
- k. Program Pendidikan Politik Masyarakat.

C. RENCANA KINERJA TAHUNAN

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam renstra dan akan dilaksanakan oleh Kantor Kesbangpol melalui kegiatan tahunan penyusunan RKT meliputi tujuan, sasaran, indikator kinerja sasaran, target, program, kegiatan dan anggaran. Untuk lebih jelas secara keseluruhan dapat dilihat pada **Tabel 2.1**.



Tabel 2.1.
RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
TAHUN 2017

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN
Meningkatnya pengelolaan pemerintahan yang berkualitas dan akuntabel	Meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase kesesuaian pelaporan capaian kinerja pada kantor kesbangpol	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat kesesuaian pelaporan capaian kinerja pada unit kinerja OPD		1,132,000
			Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Kinerja SKPD	5 eksemplar	125,000
			Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Laporan Keuangan Semesteran	2 buku	295,000
			Penyusunan Rencana Kerja dan Keuangan SKPD	Rencana Kerja dan Keuangan SKPD	18 buku	712,000
			Penyusunan Renstra SKPD	Renstra SKPD	-	-
	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase berfungsinya sarana dan prasarana aparatur	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase berfungsinya sarana dan prasarana aparatur		68,470,000
			Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kendaraan Dinas yang dibeli	1 Unit Kendaraan Dinas Roda 2	-
			Pengadaan Perlengkapan Kantor	Perlengkapan Kantor yang dibeli	14 jenis	42,020,000
			Pengadaan Peralatan Kantor	Peralatan Kantor yang dibeli	6 jenis	26,450,000



	Meningkatnya Disiplin Aparatur	Persentase disiplin aparaturnya dalam pakaian dinas	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase disiplin aparaturnya dalam berpakaian dinas		-
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas yang dibeli	20 Stel	-
			Pengadaan Pakaian Dinas Khusus hari-hari tertentu	Jumlah Pakaian Dinas Khusus hari tertentu yang dibeli	20 Stel	-
	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran		296,314,100
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Perangko, Materai dan Buku Cek	225 Lbr Materai, 2 Buku Cek	1,090,000
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tagihan Rekening Telepon dan Internet	24 Tagihan	7,100,000
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	Kendaraan Dinas/ Operasional yang dipelihara	1 unit Kendaraan Dinas Roda 4 - 4 Unit Kendaraan Dinas Roda 2	35,039,600
			Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Luas Kantor / Jumlah Ruangan yang dilayani jasa kebersihan	12 Bulan	38,708,000
			Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang mendapat jasa perbaikan	4 unit komputer, 6 unit laptop, 3 unit printer, 1 ac, 1 exhaustfan, 2 TV	2,350,000
			Penyediaan Alat Tulis Kantor	Alat Tulis Kantor yang disediakan	43 macam	12,966,500
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	7 macam	11,005,000

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)

KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BUKITINGGI TAHUN 2017



			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor disediakan	15 buah bola lampu neon, 2 buah stop kontak dan 2 buah kabel raun	955,000	
			Penyediaan Makanan dan Minuman	Makanan dan Minuman yang disediakan	70 bungkus nasi, 30 porsi minum dan 40 kotak snack	7,100,000	
			Rapat-Rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya Ke Luar Kota Bukittinggi	Rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi yang difasilitasi	12 Bulan	175,000,000	
	<p>Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap ideologi Negara, wawasan kebangsaan dan bela negara</p>	<p>Jumlah kasus penyimpangan ideologi negara</p>	Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Jumlah Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa yang dilaksanakan	4 Paket	5,000,000	
				<p>Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan</p>	<p>Persentase jumlah gangguan keamanan yang dapat diredam akibat gerakan yang ingin mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi lain</p>		<p>159,349,600</p>
				Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Laporan pelaksanaan sosialisasi	120 orang	27,054,000
				Pelatihan Peningkatan Kesadaran Bela Negara	Peserta pelatihan	100 orang	79,825,000
				Penguatan Forum Pembauran Kebangsaan	Laporan Forum Pembauran Kebangsaan	4 Laporan	40,281,600

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)

KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BUKITINGGI TAHUN 2017



			Program Pelaksanaan Penghormatan Hari-Hari Besar	Persentase pelaksanaan Hari Besar Kenegaraan		4,428,000
			Pelaksanaan Upacara Kesadaran Nasional dan Hari Besar Lainnya	Kegiatan Upacara Kesadaran Nasional	1 kali	4,428,000
			Program Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Agama dan Pembinaan Kerukunan Beragama	Tingkat Kualitas Pemahaman dan Pengalaman Agama dan Pembinaan Kerukunan Beragama		300,517,000
			Forum Pemantapan Kerukunan Antar Umat Beragama	Laporan Pembinaan Kerukunan Antar Umat Beragama di Kota Bukittinggi	1 Laporan	7,761,000
			Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat	Peserta Sosialiasai dan Laporan Razia	210 orang dan 3 laporan razia	292,750,000
	Meningkatnya kualitas demokrasi	1. Persentase partisipasi pemilih pada pileg/ pilpres	Program Pendidikan Politik Masyarakat	Persentase jumlah partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum		1,664,167,500
		2. Persentase partisipasi pemilih pada pemilukada	Forum Diskusi Politik Kota Bukittinggi	Laporan Forum Diskusi Politik	12 Laporan	1,499,472,500
		3. Persentase keterwakilan perempuan di lembaga legislatif				

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)

KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2017



			Sosialisasi Undang-Undang Bidang Politik	Peserta Sosialisasi Undang-Undang dan Peraturan Bidang Politik	50 Orang	11,163,000
			Peningkatan Kesadaran Politik dan Organisasi Masyarakat	Peserta Kegiatan Peningkatan Kesadaran Politik dan Organisasi Masyarakat	50 Orang	9,468,000
	Meningkatnya kapasitas kelembagaan partai politik	Jumlah partai politik yang dibina	Program Pendidikan Politik Masyarakat	Persentase jumlah partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum		
			Verifikasi Administrasi Bantuan Keuangan Parpol	Hasil Verifikasi Administrasi Bantuan Keuangan Parpol	10 parpol	15,027,000
			Bimtek Pengajuan dan Pertanggung Jawaban Bantuan Keuangan Parpol	Peserta Bimtek Pengajuan dan Pertanggung Jawaban Bantuan Keuangan Parpol	50 Orang	44,747,000
	Meningkatnya pengawasan terhadap organisasi masyarakat	Persentase kelompok masyarakat yang melaporkan aktifitasnya	Program Pendidikan Politik Masyarakat	Persentase jumlah partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum		
			Pembinaan dan Fasilitasi Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan	Laporan Pembinaan dan Fasilitasi Pendaftaran Ormas	12 ormas	25,714,000



	Meminimalisasi potensi konflik	1. Persentase laporan forum kewaspadaan dini yang tidak ditindak lanjuti 2. Jumlah sinergitas lintas sektoral yang terjalin	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase jumlah potensi konflik sosial yang dapat dicegah		36,298,600
			Pengawasan Orang Asing	Laporan Orang Asing	4 laporan	36,298,600
			Tim Terpadu Penanganan Penanganan Konflik Sosial	Laporan Tim Terpadu Penanganan Penanganan Konflik Sosial	4 Laporan	58,576,000
			Program Pemeliharaan Kantibmas dan Tindak Kriminal	Terdeteksinya potensi, gejala, atau peristiwa yang menjadi ancaman stabilitas daerah		984,591,400
			Operasionalisasi Komunitas Intelijen Daerah	Laporan Kominda	12 Laporan	486,499,400
			Operasional Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat	Laporan FKDM	120 orang	32,753,000
			SATGAS Saber Pungli	Laporan Saber Pungli	12 laporan	172,589,000
			Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat	Efektifitas kegiatan pemberantasan Narkotika		56,129,200



			Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba	Peserta Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba	100 Orang	14,637,600
			Tes Urine bagi ASN di lingkungan Pemko Bukittinggi	Laporan hasil tes urine	420 orang	41,491,600
JUMLAH						3,266,452,400



D. PENETAPAN KINERJA

Rencana Kinerja Tahunan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi Tahun 2017 yang telah dibuat untuk melaksanakan kegiatan, program dan sasaran di Tahun 2017 menjadi tumpuan bagi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi untuk mewujudkan kinerja *output* ataupun *outcome* yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi Tahun 2017 berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada tanggal 20 Nopember 2014, yang menjadikan Perjanjian Kinerja sebagai komitmen kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi. **Sebagaimana dapat dilihat pada lampiran Perjanjian Kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi Tahun 2017.**

Perjanjian Kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi Tahun 2017 dijadikan acuan untuk mengukur Kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi Tahun 2017 dan melaporkannya dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/ target kinerja yang telah ditetapkan melalui kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Guna melihat keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai misi organisasi dilakukan penilaian melalui pencapaian kinerja sesuai dengan hasil pengukuran melalui perbandingan antara target dan realisasi kinerja serta realisasi anggaran.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran pencapaian kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi dilakukan dengan membandingkan antara rencana (*Performance Plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance Result*) yang dicapai. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (*performance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang (*performance improvement*) Adapun dalam memberikan penilaian tingkat Realisasi Kinerja setiap sasaran, menggunakan rumus sebagai berikut :

1. Tingkat Realisasi Positif

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

2. Tingkat Realisasi Negatif

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$



Adapun rincian pengukuran kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi Tahun 2017 sebagai berikut :

Tabel 3.1.
Pengukuran Realisasi Kinerja Tahun 2017

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya tata kelola organisasi	Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja	B	B	100%
		Persentase capaian realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan program/ kegiatan	95	95	100%
2	Meningkatnya stabilitas politik	Persentase penurunan konflik di bidang politik	5	5	100%
3	Meningkatnya keamanan kota bukittinggi	Persentase penurunan konflik sosial	5	5	100%

B. EVALUASI DAN ANALISIS REALISASI KINERJA

Pengukuran kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi Tahun 2017 menggunakan metode yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hasil pengukuran kinerja beserta evaluasi setiap tujuan dan sasaran Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi Tahun 2017 disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.2
Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	
				Th. 2016 (n-1)	Th. 2017 (n)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya tata kelola organisasi	Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja	B	-	B
		Persentase capaian realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan program/ kegiatan	95	95	95
2	Meningkatnya stabilitas politik	Persentase penurunan konflik di bidang politik	5	-	5



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	
				Th. 2016 (n-1)	Th. 2017 (n)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3	Meningkatnya keamanan kota bukittinggi	Persentase penurunan konflik sosial	5	-	5

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode RPJMD

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD	Realisasi Th. 2017	Tingkat Kemajuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya tata kelola organisasi	Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja	BB	B	100
		Persentase capaian realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan program/ kegiatan	95	95	100
2	Meningkatnya stabilitas politik	Persentase penurunan konflik di bidang politik	5	5	100
3	Meningkatnya keamanan kota bukittinggi	Persentase penurunan konflik sosial	5	5	100

C. KENDALA YANG DIHADAPI

Adapun permasalahan dan kendala yang ditemui dalam pencapaian target kinerja implementasi kebijakan/regulasi Kantor Kesbangpol sehingga keberhasilan yang dicapai belum maksimal yaitu:

1. Minimnya kompetensi dan kualifikasi staf untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi masing-masing;
2. Kurangnya koordinasi dan sinkronisasi serta konsolidasi dalam implementasi kebijakan/peraturan perundangan-undangan.
3. Meningkatnya potensi ancaman, gangguan, tantangan, dan hambatan dalam menciptakan kondusivitas daerah, serta tingginya intensitas gangguan kamtibmas.
4. Adanya perbedaan cara pengukuran pencapaian indikator kinerja antara Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dan pelaksanaan



kegiatan. Pada Renstra, indikator kinerja diukur dalam bentuk persentase, sedangkan dalam pelaksanaan kegiatan, indikator kinerja diukur dalam bentuk jumlah kegiatan atau jumlah peserta.

D. STRATEGI PENINGKATAN KINERJA

Strategi merupakan merupakan proses penyusunan langkah-langkah ke depan untuk mencapai kinerja yang lebih baik dalam mengatasi kendala-kendala yang dihadapi. Untuk menghadapi kendala-kendala tersebut maka Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik menetapkan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Penempatan sumber daya aparatur sesuai bidang tugas berdasarkan kompetensi sangat dibutuhkan dalam rangka peningkatan kinerja
2. Peningkatan kreativitas PNS dalam pemahaman dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing;
3. Pemanfaatan waktu yang tepat agar semua pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sesuai target yang ditetapkan dan bermanfaat bagi semua pihak yang terkait.
4. Arah kebijakan dan anggaran harus difokuskan dan diprioritaskan pada pencapaian sasaran dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
5. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan dengan lembaga terkait, termasuk pelibatan pemangku peran dalam pelaksanaan program dan kegiatan;
6. Dalam pengelolaan anggaran agar lebih ditingkatkan baik dari sisi realisasi keuangan maupun realisasi output, sehingga dapat memaksimalkan capaian kinerja;
7. Melakukan evaluasi bulanan terhadap perkembangan pelaksanaan kegiatan pada lingkup setiap seksi, yang diikuti identifikasi setiap permasalahan yang menghambat pelaksanaan kegiatan serta memilih solusi penyelesaiannya;
8. Perlunya pengawalan khusus dari masing-masing pimpinan seksi sehingga target yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja (PK) dapat tercapai;



9. Menerapkan asas-asas tertib administrasi, transparan dan arah kebijakan anggaran agar difokuskan dan diprioritaskan pada pencapaian sasaran dan pelaksanaan tugas dan fungsi skesi kesatuan bangsa dan politik

E. REALISASI ANGGARAN

1. Alokasi Anggaran Per Sasaran

Pada table dibawah ini disajikan alokasi anggaran untuk masing-masing sasaran :

Tabel 3.4
Persentase Alokasi Anggaran

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran (Rp)	Anggaran (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya tata kelola organisasi	Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja Persentase capaian realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan program/kegiatan	365.916.100	11,20
2	Meningkatnya stabilitas politik	Persentase penurunan konflik di bidang politik	1.579.877.500	48,37
3	Meningkatnya keamanan kota bukittinggi	Persentase penurunan konflik sosial	1.320.658.800	40,43

2. Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas keuangan, maka diperlukan juga perbandingan antara kinerja dan anggaran. Berikut ini disajikan perbandingan antara pencapaian kinerja dan anggaran



Tabel 3.5

Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	KINERJA			ANNGARAN			Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 6-9)
1	Meningkatnya tata kelola organisasi	Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja	BB	B	100	365.916.100	334.257.762	91.35	8.65
		Persentase capaian realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan program/kegiatan	95	95	100				
2	Meningkatnya stabilitas politik	Persentase penurunan konflik di bidang politik	5	5	100	1.579.877.500	1.458.392.025	92.31	7.69
3	Meningkatnya keamanan kota bukittinggi	Persentase penurunan konflik sosial	5	5	100	1.320.658.800	891.29.215	67.48	32.52



3. Realisasi Anggaran Per Program

Tingkat realisasi anggaran Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi Tahun 2017 secara keseluruhan terserap sebesar 86,17%, yang dibagi pada Belanja Tidak Langsung dengan tingkat realisasi sebesar 93,94% dan Belanja langsung sebesar 82,16%. Secara rinci, tingkat realisasi anggaran pelaksanaan program dan kegiatan pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi terlihat pada tabel berikut.

Tabel 3.6
Realisasi Anggaran
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi
Tahun Anggaran 2017

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI	
			Rp	%
	Belanja Daerah	4.950.438.148,00	4.265.928.297,00	86,17
	Belanja Tidak Langsung	1.683.985.748,00	1.582.049.295,00	93,94
	Belanja Langsung	3.266.452.400,00	2.683.879.002	82,16
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	296.314.100,00	266.989.312,00	90,10
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.090.000,00	1.033.000,00	94,77
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	7.100.000	5.393.015,00	75,95
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	35.039.600,00	27.602.130,00	78,77
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	38.708.000,00	38.699.364,00	99,97
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.350.000,00	2.350.000,00	100
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	12.966.500,00	12.477.500,00	96,22
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	11.005.000,00	10.720.925,00	97,41
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	955.000,00	955.000,00	100,00
	Penyediaan Makanan dan Minuman	7.100.000,00	5.197.300,00	73,20
	Rapat-Rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya Ke Luar Kota Bukittinggi	175.000.000,00	159.811.578,00	91,32
	Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	5.000.000,00	2.749.500,00	54,99



NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI	
			Rp	%
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	68.470.000,00	66.254.000,00	96,76
	Pengadaan Perlengkapan Kantor	42.020.000,00	40.130.000,00	95,50
	Pengadaan Peralatan Kantor	26.450.000,00	26.124.000,00	98,76
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1.132.000,00	1.014.450,00	89,61
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	125.000,00	124.725,00	99,78
	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	295.000,00	295.000,00	100,00
	Penyusunan Rencana Kerja dan Keuangan SKPD	712.000,00	594.725,00	83,52
	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	36.298.600,00	33.339.875,00	91,84
	Pemantauan Kegiatan Orang Asing, Lembaga Asing dan Non Government Organization	36.298.600,00	33.339.875,00	91,84
	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	159.349.600,00	99.210.600,00	62,25
	Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	27.054.000,00	12.799.000,00	47,30
	Pelaksanaan Upacara Kesadaran Nasional dan Hari Besar lainnya	4.428.000,00	3.745.000,00	84,57
	Forum Pemantapan Kerukunan Antar Umat Beragama	7.761.000,00	7.206.175,00	92,85
	Pelatihan Peningkatan Kesadaran Bela Negara	79.825.000,00	75.460.425,00	94,53
	Forum Pembauran Kebangsaan	40.281.600,00	0	0
	Program Pemeliharaan Kantibmas dan Tindak Kriminal	984.591.400,00	696.657.765,00	70,75
	Operasionalisasi Komunitas Intelijen Daerah	486.499.400,00	331.668.740,00	68,17
	Operasionallisasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat	32.753.000,00	1.137.500,00	3,47
	Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat	292.750.000,00	226.987.600,00	77,53
	Operasional SATGAS SABER Pungli	172.589.000,00	136.863.925,00	79,30
	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat	56.129.200,00	12.533.500,00	22,32
	Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba	14.637.600,00	12.533.500,00	85,62
	Tes Urine Bagi ASN di Lingkungan Kota Bukittinggi	41.491.600,00	0	0



NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI	
			Rp	%
	Program Pendidikan Politik Masyarakat	1.664.167.500,00	1.507.879.500,00	90,60
	Forum Diskusi Politik	1.499.472.500,00	1.404.752.350,00	93,68
	Sosialisasi Undang-undang Bidang Politik	11.163.000,00	6.472.000,00	57,97
	Verifikasi Administrasi Bantuan Keuangan Parpol	15.027.000,00	6.587.550,00	43,83
	Peningkatan Kesadaran Politik dan Organisasi Masyarakat	9.468.000,00	7.908.000,00	83,52
	Pembinaan dan Fasilitasi Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan	25.714.000,00	9.803.000,00	38,12
	Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial	58.576.000,00	39.684.475,00	67,74
	Bimbingan Teknis Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	44.747.000,00	32.672.125,00	73,01

Penyerapan anggaran berdasarkan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2017 dapat dilihat sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran yang merupakan Program rutin yang dilaksanakan setiap SKPD ini ditunjang dengan pelaksanaan 11 kegiatan. Pada tahun anggaran 2017, program yang dianggarkan dana sebesar Rp. 296.314.100,- ini terealisasi sebesar Rp. 266.989.312,- atau dengan tingkat capaian sebesar 90,10 %.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pada tahun 2017, pelaksanaan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur didukung dengan pelaksanaan 2 (dua) kegiatan dalam rangka menyediakan perlengkapan dan peralatan kantor. Dari dana yang dianggarkan sebesar Rp. 68.470.000,- dapat direalisasikan sebesar Rp. 68.470.000,- atau dengan tingkat capaian 96,76 %.

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Program yang ditunjang dengan pelaksanaan 3 (tiga) kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka penyediaan dokumen dan laporan yang



terkait dengan perencanaan, penganggaran dan pertanggungjawaban. Program ini dianggarkan dana sebesar Rp. 1.132.000,- dan direalisasikan sebesar Rp. 1.014.450,- atau dengan capaian 89,61%.

4. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan yang didukung dengan pelaksanaan kegiatan Pemantauan Kegiatan Orang Asing, Lembaga Asing dan Non Government Organization. Dengan anggaran sebesar Rp. 36.298.600,- dapat terealisasi sebesar Rp. 33.339.875,- atau dengan capaian 91,84%.

5. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan pada tahun anggaran 2017 dianggarkan dana sebesar Rp. 159.349.600,- dapat terealisasi sebesar 99.210.600,- atau dengan capaian 62,25%. Anggaran tersebut dipergunakan untuk pelaksanaan 5 (lima) kegiatan dalam upaya menumbuhkembangkan wawasan kebangsaan dan bela negara.

6. Program Pemeliharaan Kamtibmas dan Tindak Kriminal

Program yang ditunjang dengan pelaksanaan 4 (empat) kegiatan ini merupakan rangkaian upaya pemeliharaan ketertiban umum, penanggulangan kejahatan dan perlindungan masyarakat terhadap kejahatan. Program ini dianggarkan dana sebesar Rp. 984.591.400,- dan direalisasikan sebesar Rp. 696.657.765,- atau dengan capaian 70,75%.

7. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat

Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat didukung dengan pelaksanaan 2 (dua) kegiatan, guna pencegahan peredaran minuman keras dan narkoba serta penekanan pengguna narkoba dilingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi. Program ini dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp. 56.129.200,- dapat direalisasikan sebesar Rp. 12.533.500,- atau dengan tingkat capaian 22,32%.

8. Program Pendidikan Politik masyarakat

Pelaksanaan Program Pendidikan Politik Masyarakat pada tahun anggaran 2017 didukung dengan anggaran sebesar Rp. 1.664.167.500,- dapat direalisasikan sebesar Rp. 1.507.879.500,-



Anggaran tersebut digunakan untuk pelaksanaan 7 (tujuh) kegiatan yang terkait dengan pendidikan politik masyarakat dan pelaksanaan Pemilu/Pilka. Program pendidikan politik masyarakat ini dapat berjalan dengan baik dengan tingkat capaian keuangan sebesar 90,60%.



BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2017, sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya. Dari hasil evaluasi terhadap kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi dapat disimpulkan bahwa sasaran-sasaran pada tiap-tiap tujuan yang ditetapkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD) 2016-2021 dapat tercapai dengan baik.

B. LANGKAH KEDEPAN

Langkah kedepan yang akan dilakukan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi untuk meningkatkan kinerjanya antara lain :

1. Meningkatkan tata kelola organisasi
 - a. Melaksanakan pengembangan kapasitas dan manajemen aparatur
 - b. Melaksanakan manajemen pengelolaan kepegawaian yang efektif, efisien, dan akuntabel berbasis teknologi informasi
 - c. Melaksanakan penerapan pemberian penghargaan dan sanksi terhadap kinerja aparatur
 - d. Melaksanakan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah.
2. Meningkatnya stabilitas politik
 - a. Mengembangkan sistem dan budaya politik yang demokratis
 - b. Mendewasakan sikap dan prilaku masyarakat dalam berdemokrasi
 - c. Meningkatkan pengetahuan pengurus ormas-ormas/ LSM mengenai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan ormas/ LSM
3. Meningkatnya keamanan Kota Bukittinggi
 - a. Melaksanakan pemantapan koordinasi dalam rangka pemantapan dan pengawasan organisasi aliran kepercayaan masyarakat



- b. Melaksanakan koordinasi kerukunan antar umat beragama yang dilandasi toleransi, saling menghormati dalam pengamalan ajaran agama
- c. Mengembangkan kesadaran berbangsa dan bernegara di semua aspek kehidupan masyarakat
- d. Memantapkan proses pembauran kebangsaan di segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
- e. Menerapkan makna nilai-nilai luhur Pancasila di semua aspek kehidupan masyarakat
- f. Mengatasi berbagai konflik dalam kehidupan bermasyarakat yang mengarah kepada gangguan dan ancaman terhadap ketentraman masyarakat
- g. Melaksanakan pencegahan, penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba
- h. Melaksanakan pengawasan dan antisipasi kemungkinan terjadinya akses dari keberadaan/ kehadiran orang asing.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi yang menggambarkan capaian kinerja tiap-tiap Tujuan dan Sasaran pada Tahun 2017 dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Kota Bukittinggi.

Bukittinggi, Februari 2018

KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA BUKITTINGGI





LAMPIRAN

Lampiran, berisi data pendukung dari LKIP Tahun 2017 yang terdiri dari:

1. Indikator Kinerja Utama (IKU) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.
2. Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
3. Perjanjian Kinerja (PK) Eselon IV Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.




**INDIKATOR KINERJA UTAMA
KANTOR KESBANGPOL KOTA BUKITTINGGI
TAHUN 2016 - 2021**

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Formula Perhitungan	Sumber Data	Target						KET
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1 Meningkatkan prestasi dan kesetiaan melalui pengamalan nilai-nilai wawasan kebangsaan	2 Meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang wawasan kebangsaan, ideologi dan pembelaan kebangsaan serta terwujudnya ketahanan ekonomi, seni, budaya dan agama berparipatiran.	4	4 1. Jumlah peserta pendidikan wawasan dan pembelaan kebangsaan x 100% Jumlah penduduk 2. Jumlah aparatur dan masyarakat yang di bias x 100% Jumlah penduduk	Kantor Kesbangpol	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
					100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2 Meningkatkan kesetiaan bangsa melalui pengamalan pengamalan pilar kebangsaan	4 Meningkatkan Kesatuan, Ketertarikan, dan Keterlibatan Masyarakat	4	4 1. Jumlah konflik yang ditangani x 100% Jumlah konflik yang terjadi 2. Jumlah aparat dan masyarakat yang di bias x 100% Jumlah penduduk	Kantor Kesbangpol	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
					100%	100%	100%	100%	100%	100%	
4 Memantapkan stabilitas politik Kota Bukittinggi dan mewujudkan demokrasi yang berkualitas	4 Meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang kehidupan berpolitik demi terwujudnya stabilitas kehidupan berdemokrasi	4	4 1. Jumlah aparat dan masyarakat yang di bias x 100% Jumlah penduduk 2. Jumlah suara yang sah pemilu x 100% Jumlah pemilih	Kantor Kesbangpol KPU	100%	100%	100%	100%	100%	100%	70%
					100%	100%	100%	100%	100%	75%	

Bukittinggi, 30 Maret 2017

**KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA BUKITTINGGI**


JONI FERISAP
 NIP. 197306011994111001



PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
JL. Jend.Sudirman No.27-29 Bukittinggi Telp. (0752) 23976

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BUKITTINGGI

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : JONI FERU, AP

Jabatan : Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : H. M. RAMLAN NURMATIAS, SH.

Jabatan : Walikota Bukittinggi

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bukittinggi, Februari 2017

PIHAK KEDUA
Walikota Bukittinggi


H. M. RAMLAN NURMATIAS, SH

PIHAK PERTAMA
Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik


JONI FERU, AP
NIP. 197306011993111001



LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA BUKITTINGGI

Organisasi Perangkat Daerah : Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Tahun Anggaran : 2017

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya tata kelola organisasi	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	B
		Persentase capaian realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan program/Kegiatan	95%
2	Meningkatnya kesadaran, pemahaman, pengamalan nilai-nilai Pancasila, wawasan kebangsaan dan nasionalisme di masyarakat	Persentase menurunnya konflik yang memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa	5%
3	Mengoptimalkan pencegahan dini dan peningkatan keamanan, kenyamanan lingkungan	Persentase penurunan konflik sosial	5%
		Persentase penurunan angka kriminalitas	5%
4	Meningkatnya kualitas demokrasi	Nilai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	55

Jumlah Anggaran Program (31 kegiatan) Tahun 2017 sebesar : Rp. 2.453.751.000,-


No	Program	Kegiatan	Anggaran	Ket
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	10 kegiatan	Rp. 191.027.900,-	APBD
2	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	3 kegiatan	Rp. 705.000,-	APBD
3	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	1 kegiatan	Rp. 37.098.600,-	APBD
4	Program Kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	4 kegiatan	Rp. 154.921.600,-	APBD
5	Program Pemeliharaan Kantibmas dan Tindak Kriminal	4 kegiatan	Rp. 871.065.400,-	APBD
6	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat	3 kegiatan	Rp. 89.534.500,-	APBD
7	Program Pendidikan Politik Masyarakat	6 kegiatan	Rp. 1.109.398.000,-	APBD
		JUMLAH	Rp. 2.453.751.000,-	

Bukittinggi, Februari 2017

PIHAK KEDUA
Walikota Bukittinggi


H. M. RAMLAN NURMATIAS, SH

PIHAK PERTAMA
Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik


IONI FERI, AP
NIP. 197306011993111001



PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
JL. Jend.Sudirman No.27-29 Bukittinggi Telp. (0752) 23976

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BUKITTINGGI

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : EVA SUSANTI, SH.

Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : JONI FERU, AP

Jabatan : Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik


selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bukittinggi, Februari 2017

PIHAK KEDUA
Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik


JONI FERU, AP
NIP. 197306011993111001

PIHAK PERTAMA
Kepala Sub Bagian Tata Usaha


EVA SUSANTI, SH.
NIP. 196709071988032005



LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA BUKITTINGGI

Organisasi Perangkat Daerah : Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Tahun Anggaran : 2017

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya tata kelola organisasi	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	B
		Persentase capaian realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan program/Kegiatan	95%

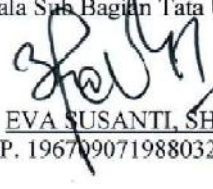
No	Program/Kegiatan	Anggaran
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 191.027.900,-
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp. 1.090.000,-
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 6.240.000,-
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Rp. 34.819.200,-
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Rp. 30.727.200,-
5	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 2.350.000,-
6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Rp. 11.712.500,-
7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp. 8.905.000,-
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp. 955.000,-
9	Penyediaan Makanan dan Minuman	Rp. 4.229.000,-
10	Rapat-Rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya Ke Luar Kota Bukittinggi	Rp. 90.000.000,-
II	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp. 705.000,-
1	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Rp. 295.000,-
2	Penyusunan Rencana Kerja dan Keuangan SKPD	Rp. 285.000,-
3	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp. 125.000,-
	JUMLAH	Rp. 191.732.900,-

Bukittinggi, Februari 2017

PIHAK KEDUA
Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik


JONI FERY AP
NIP. 197306011993111001

PIHAK PERTAMA
Kepala Sub Bagian Tata Usaha


EVA SUSANTI, SH.
NIP. 196709071988032005



PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
JL. Jend.Sudirman No.27-29 Bukittinggi Telp. (0752) 23976

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BUKITTINGGI

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. ELQADRI, M.Si.

Jabatan : Kepala Seksi Pembinaan Politik

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : JONI FERLI, AP

Jabatan : Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bukittinggi, Februari 2017

PIHAK KEDUA
Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

JONI FERLI, AP
NIP. 197306011993111001

PIHAK PERTAMA
Kepala Seksi Pembinaan Politik

Drs. ELQADRI, M.Si.
NIP. 197111171992031004



LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA BUKITTINGGI

Organisasi Perangkat Daerah : Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Tahun Anggaran : 2017

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Mengoptimalkan pencegahan dini dan peningkatan keamanan,kenyamanan lingkungan	Persentase penurunan konflik sosial	5%
		Persentase penurunan angka kriminalitas	5%
2	Meningkatnya kualitas demokrasi	Nilai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	B

No	Program/Kegiatan	Anggaran
I	Program Pemeliharaan Kantibmas dan Tindak Kriminal	Rp. 364.201.000,-
1	Operasional Satgas Saber Pungli	Rp. 364.201.000,-
II	Program Pendidikan Politik Masyarakat	Rp. 1.083.684.000,-
1	Forum Diskusi Politik Kota Bukittinggi	Rp. 998.085.000,-
2	Sosialisasi Undang-Undang Bidang Politik	Rp. 11.163.000,-
3	Verifikasi Administrasi Bantuan Keuangan Parpol	Rp. 6.392.000,-
4	Peningkatan Kesadaran Politik dan Organisasi Masyarakat	Rp. 9.468.000,-
5	Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial	Rp. 58.576.000,-
JUMLAH		Rp. 1.447.885.000,-

Bukittinggi, Februari 2017

PIHAK KEDUA
Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik


JONI FEBRI AP
NIP. 197306011993111001

PIHAK PERTAMA
Kepala Seksi Pembinaan Politik


Drs. ELQADRI, M.Si
NIP. 197111171992031004



LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA BUKITTINGGI

Organisasi Perangkat Daerah : Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Tahun Anggaran : 2017

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Mengoptimalkan pencegahan dini dan peningkatan keamanan, kenyamanan lingkungan	Persentase penurunan konflik sosial	5%
		Persentase penurunan angka kriminalitas	5%
2	Meningkatnya kualitas demokrasi	Nilai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	B

No	Program/Kegiatan	Anggaran
I	Program Pemeliharaan Kantibmas dan Tindak Kriminal	Rp. 364.201.000,-
1	Operasional Satgas Saber Pungli	Rp. 364.201.000,-
II	Program Pendidikan Politik Masyarakat	Rp. 1.083.684.000,-
1	Forum Diskusi Politik Kota Bukittinggi	Rp. 998.085.000,-
2	Sosialisasi Undang-Undang Bidang Politik	Rp. 11.163.000,-
3	Verifikasi Administrasi Bantuan Keuangan Parpol	Rp. 6.392.000,-
4	Peningkatan Kesadaran Politik dan Organisasi Masyarakat	Rp. 9.468.000,-
5	Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial	Rp. 58.576.000,-
JUMLAH		Rp. 1.447.885.000,-

Bukittinggi, Februari 2017

PIHAK KEDUA
Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik


JONIFER AP
NIP. 197306011993111001

PIHAK PERTAMA
Kepala Seksi Pembinaan Politik


Drs. ELQADRI, M.Si.
NIP. 197111171992031004



PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
JL. Jend.Sudirman No.27-29 Bukittinggi Telp. (0752) 23976

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BUKITTINGGI

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DELISMAN, S.Sos.

Jabatan : Kepala Seksi Bina Kesatuan Bangsa

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : JONI FERI, AP

Jabatan : Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bukittinggi, Februari 2017

PIHAK KEDUA
Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik


JONI FERI, AP
NIP. 197306611993111001

PIHAK PERTAMA
Kepala Seksi Bina Kesatuan Bangsa


DELISMAN, S.Sos.
NIP. 197009261994031002



LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA BUKITTINGGI

Organisasi Perangkat Daerah : Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Tahun Anggaran : 2017

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya kesadaran, pemahaman, pengamalan nilai-nilai Pancasila, wawasan kebangsaan dan nasionalisme di masyarakat	Persentase menurunnya konflik yang memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa	5%
2	Mengoptimalkan pencegahan dini dan peningkatan keamanan, kenyamanan lingkungan	Persentase penurunan konflik sosial	5%
		Persentase penurunan angka kriminalitas	5%

No	Program/Kegiatan	Anggaran
I	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Rp. 37.098.600,-
1	Pemantauan Kegiatan Orang Asing, Lembaga Asing dan Non Government Organization	Rp. 37.098.600,-
II	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Rp. 106.879.000,-
1	Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Rp. 27.054.000,-
2	Pelatihan Peningkatan Kesadaran Bela Negara	Rp. 79.825.000,-
III	Program Pemeliharaan Kantibmas dan Tindak Kriminal	Rp. 474.111.400,-
1	Operasional Komunitas Intelijen Daerah	Rp. 181.361.400,-
2	Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat	Rp. 292.750.000,-
	JUMLAH	Rp. 584.789.000,-

Bukittinggi, Februari 2017

PIHAK KEDUA
Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik


JONI FERI AP
NIP. 197306011993111001

PIHAK PERTAMA
Kepala Seksi Bina Kesatuan Bangsa


DELISMAN, S.Sos.
NIP. 197009261994031002



PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
JL. Jend.Sudirman No.27-29 Bukittinggi Telp. (0752) 23976

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BUKITTINGGI

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. YURIZET

Jabatan : Kepala Seksi Bimbingan Umum dan Bimbingan Masyarakat

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : JONI FERI, AP

Jabatan : Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bukittinggi, Februari 2017

PIHAK KEDUA
Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik


JONI FERI, AP
NIP. 197306011993111001

PIHAK PERTAMA
Kepala Seksi Bimbingan Umum dan
Bimbingan Masyarakat


Drs. YURIZET
NIP. 196402281989031001



LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA BUKITTINGGI

Organisasi Perangkat Daerah : Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Tahun Anggaran : 2017

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya kesadaran, pemahaman, pengamalan nilai-nilai Pancasila, wawasan kebangsaan dan nasionalisme di masyarakat	Persentase menurunnya konflik yang memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa	5%
2	Mengoptimalkan pencegahan dini dan peningkatan keamanan, kenyamanan lingkungan	Persentase penurunan konflik sosial	5%
		Persentase penurunan angka kriminalitas	5%
3	Meningkatnya kualitas demokrasi	Nilai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	B

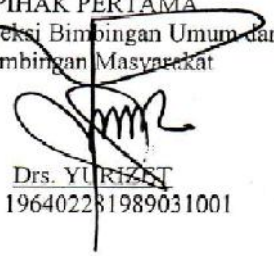
No	Program/Kegiatan	Anggaran
I	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Rp. 48.042.600,-
1	Forum Pemantapan Kerukunan Umat Beragama	Rp. 7.761.000,-
2	Forum Pembauran Kebangsaan	Rp. 40.281.600,-
II	Program Pemeliharaan Kantibmas dan Tindak Kriminal	Rp. 32.753.000,-
1	Operasionalisasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat	Rp. 32.753.000,-
III	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat	Rp. 89.534.500,-
1	Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba	Rp. 14.637.600,-
2	Operasionalisasi Komunitas Pemuda Anti Narkotika (Kompani) Kota Bukittinggi	Rp. 34.569.400,-
3	Tes Urine bagi ASN di Lingkungan Kota Bukittinggi	Rp. 40.327.500,-
IV	Program Pendidikan Politik Masyarakat	Rp. 25.714.000,-
1	Pembinaan dan Fasilitasi Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan	Rp. 25.714.000,-
JUMLAH		Rp. 196.044.100,-

Bukittinggi, Februari 2017

PIHAK KEDUA
Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik


JONI FERI, AP
NIP. 197306011993111001

PIHAK PERTAMA
Kepala Seksi Bimbingan Umum dan
Bimbingan Masyarakat


Drs. YURIZET
NIP. 196402281989031001